

## Kedudukan Lembaga Negara Dalam Makan Bergizi Gratis

Denok Oktawila<sup>1</sup>, Himawan Estu Bagijo<sup>2</sup>, Tanudjaja<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya

**Abstrak**-Program makan bergizi gratis adalah rencana pemberian makan bergizi di sekolah ataupun pesantren untuk memperbaiki gizi para pelajar. Estimasi jumlah penerima manfaat (secara nasional) program makan bergizi gratis untuk 514 kabupaten/ kota dengan total anak sekolah yaitu 16.110.000 juta pelajar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan nilai Pancasila melalui program makan bergizi gratis. Penelitian ini menggunakan metode *Socio Legal* dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi, serta menafsirkan penelitian yang tersedia untuk digunakan sebagai sumber data. Program makan bergizi gratis yang di canangkan pemerintah tujuannya berkaitan erat dengan sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Melalui program ini, pemerintah berupaya memberikan akses yang merata kepada seluruh siswa di Indonesia tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun sosial. Program ini mencerminkan nilai keadilan sosial karena setiap individu diperlakukan setara dan mendapatkan manfaat yang sama demi kesejahteraan bersama. Program ini juga diharapkan berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Dengan menyediakan makanan bergizi gratis, siswa dari keluarga kurang mampu dapat terpenuhi kebutuhan gizinya tanpa harus terbebani dengan biaya tambahan. Kebutuhan gizi yang tercukupi akan membantu meningkatkan kesehatan siswa dan memperbaiki kemampuan belajar mereka.

**Kata Kunci:** Bergizi, Gratis, Keadilan, Pemerintah

**Abstract**-The free nutritious meal program is a plan to provide nutritious meals in schools or Islamic boarding schools to improve students' nutrition. Estimated number of beneficiaries (nationally) of the free nutritious meal program for 514 districts/cities with a total of 16,110,000 million school children. The aim of this research is to determine the application of Pancasila values through the free nutritious meal program. This research uses the Systematic Literature Review (SLR) method by identifying, reviewing, evaluating, and interpreting available research to be used as a data source. The aim of the free nutritious meal program launched by the government is closely related to the fifth principle of Pancasila, namely "Social Justice for All Indonesian People." Through this program, the government seeks to provide equal access to all students in Indonesia regardless of economic or social background. This program reflects the value of social justice because every individual is treated equally and gets the same benefits for the common good. This program is also expected to play a role in reducing social disparities. By providing free nutritious food, students from underprivileged families can have their nutritional needs met without having to be burdened with additional costs. Adequate dietary needs will help improve students' health and improve their learning abilities.

**Keywords:** Nutritious, Free, Justice, Government

### 1. PENDAHULUAN

Program Makan Siang Gratis atau “Makan Bergizi Gratis” (MBG) yang dicanangkan oleh pasangan Prabowo-Gibran secara resmi telah dibahas dalam perencanaan anggaran tahun 2025. Pada saat kajian ini ditulis, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko) dan tim transisi Prabowo-Gibran menetapkan besaran anggaran MBG sebesar Rp 71 triliun pada tahap pertama di tahun 2025. Besaran ini dinilai telah memperhitungkan target defisit fiskal sebesar 2.29% - 2.82% (Prabowo-Gibran, 2023; BBC Indonesia, 2024). Program MBG pada tahap pertama akan difokuskan menyasar kelompok pelajar SD-SMP-SMA kategori kuintil 1 dan 2 di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Indonesia (BBC Indonesia, 2024) [1]. Meskipun begitu, ketika kajian ini ditulis diskusi dan penyesuaian masih terus bergulir. Menurut tim transisi Prabowo-Gibran, target sasaran, besar anggaran dan tata kelola program akan terus dievaluasi dan diperluas untuk mengentaskan stunting di Indonesia. Besarnya anggaran yang akan dikeluarkan serta efektivitas dampak yang akan dihasilkan dari program ini menjadi pro dan kontra diskursus publik. Terlebih anggaran publik dan kebijakan publik sepatutnya dipertanggungjawabkan oleh para pembuat kebijakan. Selain itu, perubahan terkait nama program, sasaran, anggaran dan sebagainya diketahui masyarakat sipil hanya melalui pemberitaan media. Belum tersedia kanal dan mekanisme partisipasi publik yang menetap, transparan dan berkelanjutan untuk memastikan partisipasi masyarakat sipil dalam memantau perkembangan program. State of the art dalam penelitian ini Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis pemerintah Indonesia untuk meningkatkan gizi siswa dan menurunkan angka stunting melalui penyediaan makanan bergizi di sekolah. Secara global, program serupa terbukti efektif dalam meningkatkan kehadiran siswa, konsentrasi belajar, serta status kesehatan dan gizi anak-anak [6] [9]. Di Indonesia, program ini dijalankan oleh Badan Gizi Nasional berdasarkan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024 dan melibatkan kolaborasi lintas kementerian serta UMKM lokal [7]. MBG juga mencerminkan nilai keadilan sosial sesuai sila kelima Pancasila, dengan memberikan akses setara kepada seluruh siswa tanpa diskriminasi [8]. Namun, program ini masih menghadapi tantangan koordinasi dan distribusi yang perlu diperbaiki untuk menjamin efektivitas dan keberlanjutannya.

World Food Program (WFP) menjelaskan bahwa program pemberian makanan di sekolah memiliki tujuan lintas sektor yang kompleks dan saling terkait, mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Sejumlah studi menunjukkan dampak positif program pemberian makanan di sekolah terhadap berbagai eksternalitas di bidang pendidikan dan kesehatan. Implementasi program ini terbukti meningkatkan akses pendidikan melalui pengurangan hambatan bersekolah, peningkatan angka partisipasi pendaftaran, peningkatan tingkat kehadiran, peningkatan kemampuan konsentrasi siswa, serta peningkatan hasil pembelajaran (African Union, 2018). Implementasi program pemberian makanan di sekolah—di berbagai negara— menunjukkan perbaikan kesehatan dan gizi yang signifikan pada anak-anak sekolah. Studi oleh Adelman *et al.* (2019) dan Fernandes *et al.* (2016) menunjukkan bukti empiris bahwa pemberian makanan di sekolah mampu mengurangi rasa lapar dan menurunkan angka defisiensi mikronutrien anak-anak, termasuk peningkatan konsentrasi hemoglobin dan perbaikan vitamin A. Terjadinya penurunan defisiensi terjadi karena penyediaan menu makanan yang beragam dan implementasi fortifikasi pangan.

Program pemberian makanan di sekolah memiliki signifikansi substansial bagi anak-anak di daerah dengan pendapatan rendah. Makanan yang disajikan di sekolah seringkali menjadi satu-satunya asupan nutrisi rutin yang bisa mereka akses setiap hari. Fakta ini menunjukkan relevansi program dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang kedua, yakni mengakhiri kelaparan. Di daerah berpendapatan tinggi, program ini umumnya dirancang untuk merekayasa kebiasaan makan. Manfaat program pemberian makanan di sekolah juga meluas ke Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hingga orang tua murid. Studi oleh UN WFP (2023) menunjukkan bahwa pelibatan UMKM lokal dalam penyediaan makanan kepada siswa berhasil meningkatkan produksi dan membuka lapangan kerja baru. Pelibatan UMKM lokal tersebut, pada akhirnya, berkontribusi pada pemberdayaan UMKM, peningkatan produktivitas, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Program ini berpotensi memungkinkan orang tua siswa untuk mengalokasikan uang saku anak ke hal-hal lain yang lebih bermanfaat, atau memungkinkan anak-anak penerima program untuk menabung (WFP, 2023).

Pemerintahan terpilih 2024—2029 di Indonesia telah mencanangkan implementasi bertahap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari tahun 2024 hingga 2029. Uji coba program ini telah dilaksanakan sejak Mei 2024, menerapkan beragam mekanisme, termasuk kolaborasi dengan UMKM dan mitra pengemudi dari layanan transportasi online. Hasil estimasi efek pengganda program MBG berdasarkan pelaksanaan *pilot project* menunjukkan dampak ekonomi yang besar, diantaranya:

1. Alokasi belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 71 triliun pada tahun 2025 dapat mendorong pertumbuhan PDB sebesar 0,06% atau sebesar Rp 14,61 triliun PDB harga berlaku tahun 2025.
2. Alokasi belanja program MBG dapat mendorong pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,19% dan mendorong pertumbuhan upah tenaga kerja sebesar 0,39%.
3. Alokasi belanja program MBG akan mendorong pertumbuhan impor lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor dan investasi dalam negeri. Dengan demikian, program MBG agar terdesentralisasi menggunakan sumber pangan dan bahan baku lokal sehingga biaya distribusi lebih murah, mengurangi nilai impor, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta UMKM.
4. Terdapat peningkatan rerata 3 tenaga kerja pada UMKM yang terlibat *pilot project* program MBG di 10 kota/kabupaten.
5. UMKM yang terlibat dalam *pilot project* program MBG mendapatkan rata-rata pendapatan bersih per bulan 33,68% lebih tinggi dibandingkan dengan penghasilan sebelum mengikuti program MBG.
6. Mitra pengemudi di 10 kota/kabupaten yang melaksanakan *pilot project* program MBG mendapatkan pendapatan bersih 17% lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan sebelum melaksanakan program MBG.
7. Terdapat peningkatan rata - rata 2 tambahan pemesanan yang diterima oleh mitra pengemudi di 10 kota/kabupaten yang melaksanakan *pilot project* program MBG.
8. Rencana implementasi program MBG di Indonesia melalui UMKM mulai tahun 2025 harus memastikan bahwa seluruh rangkaian program telah mengoptimalkan peran dari berbagai pemangku kepentingan terkait agar dapat menciptakan efek pengganda yang besar bagi public.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apakah kendala Lembaga Negara dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara khusus di Jakarta ? dan Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala tersebut ?. Tujuan penelitian ini antara lain:

- a. Meningkatkan kecukupan gizi ibu hamil dan bayi.
- b. Meningkatkan kondisi kesehatan dan asupan gizi anak sekolah (2 tahun hingga siswa SMP).
- c. Mengurangi angka putus sekolah / meningkatkan angka partisipasi sekolah
- d. Meningkatkan motivasi belajar anak.
- e. Meminimalisir pengeluaran rumah tangga agar dapat dimaksimalkan untuk kebutuhan lain.
- f. Stimulan pertumbuhan ekonomi lokal.
- g. Pemenuhan kebutuhan makanan orang usia lanjut (lansia) dan orang dengan disabilitas.
- h. Lapangan kerja baru untuk pekerja.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

*Socio Legal Method* adalah metode tinjauan literatur dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi, serta menafsirkan semua penelitian yang tersedia untuk digunakan sebagai sumber data. Berdasarkan metode ini penulis melakukan tinjauan dan mengidentifikasi jurnal-jurnal secara terstruktur yang pada setiap prosesnya mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan (Triandini dkk., 2019) [6]. Proses pengumpulan artikel digunakan untuk mendapatkan sumber data yang relevan dan akurat. Langkah pertama adalah menetapkan masalah, yaitu tahap mengidentifikasi dan menemukan masalah yang menjadi alasan dilakukannya penelitian. Langkah kedua adalah mencari sumber jurnal dan artikel yang relevan melalui *database* jurnal, berita, dan undang-undang menggunakan beberapa database, antara lain Pubmed, Science Direct, dan Google Scholar google, Wos, Scopus. Langkah ketiga adalah mencari artikel yang relevan dan mendiskusikan informasi yang diperoleh dapat atau tidaknya dijadikan sebagai bahan penelitian. Langkah keempat terkait persyaratan kualifikasi adalah mengulas kualitas metode SLM. Bagian akhir adalah pembahasan hasil analisis logis, kesimpulan atau uraian singkat, yang meliputi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada saat penyusunan artikel berhipotesis dan memahami hasil ringkasan. Proses penyelesaian artikel ini, penulis mengumpulkan artikel dari jurnal Jolasos: Journal Of Law and Social Society, BBC News Indonesia, Kumparan, DPR RI, Juwara Jurnal Wawasan dan Aksara, Resolusi: Jurnal Sosial Politik, Journal Of Applied Computer Science and Technology, Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan bantuan *database* Google. Kata kunci yang digunakan adalah makan bergizi gratis, dan perbaikan gizi. Artikel yang digunakan yaitu artikel yang diterbitkan dalam rentang waktu 2015 hingga 2024. Kemudian, penulis meninjau dan menganalisis artikel tersebut secara komprehensif dengan pokok hasil penelitian yang dipaparkan pada bagian pembahasan dan simpulan.

Tahapan Penelitian ini menggunakan pendekatan *Socio Legal*, yang menggabungkan metode normatif dan pendekatan empiris untuk mengkaji secara komprehensif kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tahapan penelitian dimulai dengan identifikasi masalah, yaitu dengan merumuskan isu utama terkait kendala koordinasi antar lembaga negara dalam pelaksanaan MBG, khususnya di wilayah Jakarta. Setelah itu, dilakukan pengumpulan data sekunder melalui telaah pustaka dari jurnal ilmiah, laporan kebijakan, regulasi seperti Perpres Nomor 83 Tahun 2024, serta berita dari media kredibel. Pada tahap selanjutnya, peneliti mengumpulkan data primer melalui wawancara terbatas dan observasi terhadap implementasi program di daerah uji coba (pilot project), jika memungkinkan. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data secara deskriptif-kualitatif, dengan menerapkan metode triangulasi untuk membandingkan informasi dari berbagai sumber agar diperoleh validitas temuan yang lebih tinggi. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara kebijakan yang tertulis dan realitas pelaksanaannya di lapangan, serta dampaknya terhadap tujuan peningkatan gizi dan keadilan sosial. Akhirnya, penelitian ini ditutup dengan penyusunan hasil dan simpulan, di mana peneliti menyajikan interpretasi terhadap data yang ditemukan, menjawab rumusan masalah, serta memberikan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program MBG di masa mendatang.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Lembaga Negara yang Menaungi Program Makan Bergizi Gratis

Pada 15 Agustus 2024, Presiden Jokowi telah mendirikan Badan Nasional Gizi melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, yang diharapkan akan menjadi lembaga yang bertanggung jawab atas program penyediaan makanan bergizi gratis. Badan Gizi Nasional dipimpin oleh Dewan Pengarah, Kepala Badan Gizi Nasional, serta Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Struktur pelaksanaannya meliputi kepala, wakil kepala, sekretariat utama, serta beberapa deputi yang mengurus sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, pemantauan dan pengawasan, serta inspektorat utama (Salim, 2024) [7]. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa mereka telah mendirikan 85 satuan pelayanan untuk mendukung program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Berikut adalah kementerian yang terlibat dan tugasnya:

#### a. Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

- 1) Mengalokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program makanan bergizi gratis.
- 2) Bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan dan distribusi makanan bergizi di seluruh Indonesia.
- 3) Mengawasi pelaksanaan program untuk mencapai tujuan peningkatan gizi masyarakat.

#### b. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT).

- 1) Mengajak dan memfasilitasi desa-desa untuk berpartisipasi dalam program ini.
- 2) Fokus pada penyediaan makanan sehat dan bergizi bagi masyarakat di daerah tertinggal.
- 3) Mengintegrasikan program dengan inisiatif pembangunan desa lainnya.

#### c. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

- 1) Berperan dalam implementasi program di lingkungan sekolah, terutama untuk anak-anak.
- 2) Bekerja sama dengan lembaga lain untuk pemantauan dan evaluasi program.
- 3) Menyediakan pelatihan bagi guru dan staf sekolah tentang pentingnya gizi.

**d. Kementerian Sosial (Kemensos).**

- 1) Menyusun kebijakan dan program untuk mendukung masyarakat yang membutuhkan.
- 2) Mengkoordinasikan bantuan sosial yang berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi.
- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat.

**e. Kementerian Kesehatan melalui Badan Gizi Nasional (BGN).**

- 1) Mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis terkait gizi.
- 2) Menyediakan data dan informasi mengenai status gizi masyarakat.
- 3) Bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk memastikan keberhasilan program [8].

**3.2 Regulasi Mengenai Program Makan Bergizi Gratis**

- a. Perpres Nomor 83 Tahun 2024.
- b. Surat Keputusan Deputi Bidang Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 2 Tahun 2024.

**Dalam menjalankan organisasi Badan Gizi Nasional terdiri atas:**

- a. Dewan Pengarah, yang terdiri atas:
  1. Ketua.
  2. Wakil Ketua.
  3. Anggota.
- b. Pelaksana, yang terdiri atas:
  1. Kepala.
  2. Wakil Kepala.
  3. Sekretariat Utama.
  4. Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola.
  5. Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran.
  6. Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama.
  7. Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan.
  8. Inspektorat Utama [9].

Alur koordinasi BGN lintas sektor dalam pelaksanaan program MBG dijabarkan sebagaimana pada Gambar 1 di bawah ini:



Gambar 1. Alur koordinasi BGN lintas sektor dalam pelaksanaan program MBG.

**3.3 Kriteria dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Program MBG****1. Kriteria Lokasi Provinsi dan Kabupaten/Kota.**

Penetapan lokasi pembangunan SPPG dilakukan berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut:  
Pemerataan pembangunan SPPG dilakukan dengan cara menentukan minimal 1 SPPG di setiap kabupaten/kota dan di setiap kecamatan per kabupaten. Apabila sasaran melebihi dari jumlah kabupaten di Indonesia maka kelebihan tersebut ditempatkan di kecamatan yang lain pada kabupaten yang sama dengan prioritas kepadatan jumlah siswa.

**2. Kriteria Penerima Bantuan Pemerintah**

Penerima Bantuan yang ditetapkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Organisasi dalam bentuk Yayasan.

- b) Menyiapkan unit bangunan, peralatan dapur, peralatan makan, alat kantor, prasarana kantor (alsatri) dan genset sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan oleh BGN.
- c) Yayasan mempunyai pengurus yang menjadi SPPG mitra BGN di lokasi.
- d) Komitmen menyediakan paket program MBG sesuai standar gizi,
- e) perencanaan menu dengan porsi yang benar, mutu dan keamanan pangan yang baik berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh BGN.
- f) Menyiapkan administrasi yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan.

### 3. Kriteria Swakelola

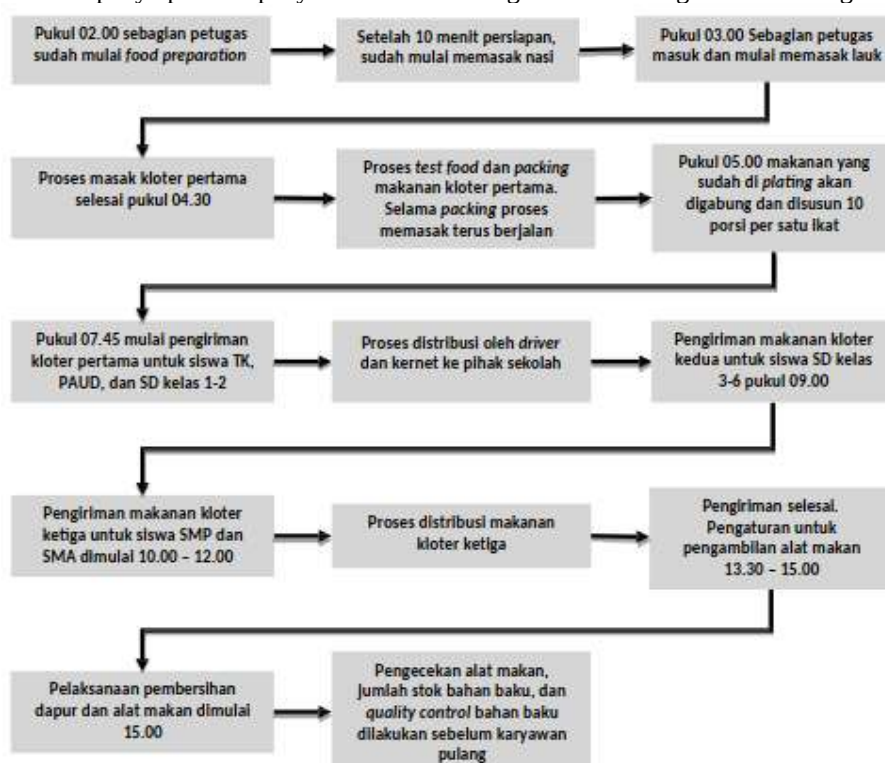
- a) BGN menyiapkan bangunan, peralatan dapur, peralatan makan,
- b) alat kantor, prasarana kantor (alsatri) dan genset serta kendaraan yang sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan.
- c) BGN melakukan pengelolaan MBG di setiap SPPG, bekerjasama dengan Yayasan/Instansi Pemerintah/Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi Masyarakat.
- d) Paket program MBG disiapkan sesuai standar gizi, perencanaan menu dengan porsi yang benar, mutu dan keamanan pangan yang baik berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh BGN.
- e) Menyiapkan administrasi yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan.

### 4. Kriteria Penerima Manfaat

Penerima manfaat kegiatan program MBG adalah seluruh siswa PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK, SLB, pesantren, sekolah keagamaan, dan pendidikan layanan khusus serta ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita di sekitar lokasi SPPG (dalam radius 6 km/waktu tempuh maksimal 30 menit) yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA Badan Gizi Nasional. Jumlah penerima manfaat diestimasi akan mencapai sekitar 3 juta di awal Januari-Februari 2025, kemudian meningkat menjadi 6 juta di bulan April 2025 dan akan mencapai kurang lebih 17,5 juta jiwa siswa dan santri serta ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita di bulan Juli 2025 yang tersebar di 38 provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah penerima manfaat di setiap titik lokasi SPPG dialokasikan kurang lebih untuk 3.000 – 4.000 siswa, santri dan ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita (jumlah akan disesuaikan dengan riil data di lapangan yang sudah diverifikasi oleh Kepala SPPG). Pemberian MBG tahun 2025 bagi siswa PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK, SLB, pesantren, sekolah keagamaan, dan pendidikan layanan khusus akan dilakukan pada setiap hari sekolah efektif selama kurang lebih 220 hari. Berdasarkan Geospasial titik SPPG dalam radius 6 km atau waktu tempuh maksimal 30 menit dengan jumlah siswa sekitar 3.000-4.000 orang.

#### a. Mekanisme

Mekanisme penyiapan dan penyaluran MBG di tingkat SPPG mengikuti alur sebagai berikut :



Gambar 5. Mekanisme Alur Penyiapan dan Penyaluran MBG

Keterangan :

- a) MBG disiapkan dan diolah setiap hari yaitu dari senin-jumat (setiap hari sekolah untuk siswa, 2 hari sekali untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita).
- b) Pengolahan MBG dilakukan maksimal 4-6 jam sebelum makan Bersama dilaksanakan di sekolah.
- c) Waktu makan bersama dilaksanakan pada istirahat pertama (makan pagi) atau makan siang.
- d) Menu yang disajikan harus dicek mutu dan keamanan Pangan secara fisik
- e) (warna, rasa, aroma) terlebih dahulu oleh pihak penyedia (juru masak) sebelum diantarkan dan dicek oleh pihak sekolah ketika MBG tiba di sekolah.
- f) MBG diberikan kepada siswa dengan menggunakan ompreng dalam keadaan baik dan aman kepada setiap siswa termasuk untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita.
- g) Pengiriman MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita bekerja sama dengan kader posyandu setempat.
- h) Siswa menggunakan alat makan (sendok dan garpu) yang dibawa dari rumah pada setiap hari makan.
- i) Siswa membawa air minum dari rumah setiap hari.

### 3.4 Organisasi dan Tata Kerja Program Makan Bergizi Gratis.

#### 1. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan dana harus memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*), maka pelaksanaan kegiatan harus memenuhi prinsip-prinsip :

- a) Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- c) Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi, dan demokratisasi.
- d) Memenuhi asas akuntabilitas.
- e) Secara berjenjang untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan uji coba program MBG mulai dari kabupaten/kota, provinsi sampai tingkat pusat harus berkoordinasi dengan baik dan efektif.

#### Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program Makan Bergizi Gratis.

##### a. Pemantauan

Pemantauan merupakan proses yang dilakukan oleh Tim BGN Pusat, Kedeputusan Bidang Pemantauan dan Pengawasan, untuk memastikan bahwa semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

KPA BGN dan PPK BGN melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah, antara lain melakukan pengawasan terhadap :

- 1) Kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan Juknis serta ketentuan peraturan terkait lainnya.
- 2) Kesesuaian target capaian dengan realisasi.

KPA mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran Bantuan pemerintah. Sanksi dapat diberikan jika hasil revidu yang dilakukan oleh Inspektorat Utama terhadap hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh Tim BGN terdapat penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dan/atau anggaran. Sanksi akan diberikan sebagai berikut:

- 1) Teguran tertulis.
- 2) Perubahan penerima manfaat.
- 3) Penggantian Kerugian Negara.

##### b. Evaluasi

Evaluasi dimaksudkan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Evaluasi kegiatan dilakukan secara berjenjang mulai dari sekolah, kabupaten/kota dan pusat minimal 1 (satu) kali, atau sewaktu-waktu apabila terjadi permasalahan yang sangat penting. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dan umpan balik serta data pelaksanaan kegiatan untuk bahan pengambilan keputusan dalam menjaga dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan.

##### c. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh SPPG kepada masing-masing Direktur Wilayah (I, II dan III) yang selanjutnya dilaporkan kepada Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN [9].

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia, terutama dari aspek koordinasi antar lembaga negara, masih menghadapi tantangan struktural dan implementatif. Temuan ini memperkuat kajian sebelumnya oleh [9] dan [11], yang menegaskan bahwa efektivitas program pemberian makanan sangat dipengaruhi oleh tata kelola lintas sektor, transparansi kebijakan, dan keterlibatan pemangku kepentingan lokal. Selain itu, penelitian ini mendukung hasil studi [6], [10], yang menyimpulkan bahwa keberhasilan program makanan sekolah bukan hanya ditentukan oleh penyediaan makanan, tetapi juga oleh dukungan kelembagaan dan mekanisme

distribusi yang tepat sasaran. Namun, penelitian ini menghadirkan kontribusi baru melalui analisis mendalam terhadap struktur kelembagaan di Indonesia, khususnya peran Badan Gizi Nasional (BGN) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024[8]. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung fokus pada aspek gizi dan pendidikan, studi ini menyoroti pentingnya sinkronisasi antarkementerian, kejelasan regulasi teknis, dan perlunya kanal partisipasi publik yang lebih terstruktur. Inovasi pelibatan UMKM dan mitra pengemudi transportasi daring sebagai bagian dari rantai logistik MBG juga menjadi ciri khas implementasi lokal yang belum banyak dijelaskan dalam literatur global, sehingga memperkaya khasanah akademik dalam studi kebijakan publik berbasis pangan dan gizi.

#### 4. KESIMPULAN

Program makan bergizi gratis merupakan program unggulan yang dijanjikan pada saat kampanye calon presiden nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presidennya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Program makan bergizi gratis yang diusulkan oleh Prabowo Subianto berawal dari kekhawatirannya terhadap kondisi gizi anak-anak Indonesia. Berdasarkan data yang Prabowo paparkan, sekitar 25% anak-anak di Indonesia tidak sarapan setiap hari. Program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah memiliki tujuan mulia yang sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Melalui program ini, pemerintah berusaha memberikan akses yang merata kepada seluruh siswa di Indonesia tanpa membedakan latar belakang ekonomi maupun sosial. Setiap siswa, baik dari keluarga yang kurang mampu maupun keluarga yang lebih sejahtera, mendapat kesempatan yang sama untuk menikmati makanan bergizi di sekolah. Langkah ini mencerminkan prinsip keadilan sosial, karena semua siswa diperlakukan setara dan memperoleh manfaat yang sama demi tercapainya kesejahteraan bersama. Program makan bergizi tidak hanya berdampak pada aspek kognitif, tetapi juga pada kesehatan mental dan fisik siswa. Dengan adanya akses makanan bergizi di sekolah, anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak perlu khawatir tentang ketersediaan makanan. Hal ini dapat mengurangi stres dan kecemasan terkait pemenuhan kebutuhan dasar, yang pada akhirnya mendukung kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Selain itu, anak-anak yang mendapatkan makanan bergizi cenderung lebih aktif dan fokus dalam belajar, yang penting bagi perkembangan akademik mereka. Secara keseluruhan, program makan bergizi terbukti memiliki manfaat yang luas, dari peningkatan prestasi akademik hingga perbaikan kesehatan fisik dan mental siswa. Program ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek tetapi juga investasi jangka panjang bagi generasi muda. Program ini juga diharapkan berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Dengan menyediakan makanan bergizi gratis, siswa dari keluarga kurang mampu dapat terpenuhi kebutuhan gizinya tanpa harus terbebani dengan biaya tambahan. Kebutuhan gizi yang tercukupi akan membantu meningkatkan kesehatan siswa dan memperbaiki kemampuan belajar mereka. Hal ini tentu akan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi siswa untuk berprestasi di sekolah, sehingga potensi mereka tidak terhalang oleh keterbatasan ekonomi. Lebih dari sekadar bantuan materi, program makan bergizi gratis ini juga menghidupkan nilai keadilan sosial yang mendasar, di mana setiap warga negara mendapatkan hak dan kesempatan yang setara untuk tumbuh dan berkembang. Pemerintah berperan dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan semua siswa belajar dengan baik tanpa harus khawatir akan kebutuhan dasar seperti asupan makanan bergizi.

#### REFERENCES

- [1] Prabowo Gibran dalam Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Gen Z dan Milenial dalam Pemilu 2024. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 48–56. <https://jsr.lib.ums.ac.id/index.php/determinasi>
- [2] Salim, H. J. (2024). Mengenal Badan Gizi Nasional, Lembaga Baru Pelaksana Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran. <https://www.liputan6.com/cekfakta/read/5677720/mengenal-badan-gizi-nasional-lembaga-baru-pelaksana-programmakan-bergizi-gratis-prabowo-gibran>.
- [3] Bappenas. (2024). ‘Konsep Program Makan Siang Gratis. Jakarta: Kementerian PPN / Bappenas.
- [4] Surat Keputusan Deputi Bidang Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 2 Tahun 2024
- [5] Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. dan. (2023). Kebijakan Gizi di Sekolah: Mewujudkan Generasi Sehat. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementrian Sosial. (2023). Bantuan Sosial untuk Masyarakat.
- [6] Adelman, S., Gilligan, D. O., & Lehrer, K. (2019). *How effective are food for education programs? A critical review of evidence from developing countries*. Food Policy.
- [7] Prabowo-Gibran. (2023). *Meningkatkan kesadaran dan partisipasi Gen Z dan Milenial dalam Pemilu 2024*. Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi, 2(1), 48–56.
- [8] Salim, H. J. (2024). Mengenal Badan Gizi Nasional, lembaga baru pelaksana program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com>
- [9] World Food Programme. (2023). *State of School Feeding Worldwide 2022*. United Nations WFP.
- [10] African Union. (2018). *Continental School Feeding Cluster Report*. African Union Commission.



- [11]F ernandes, M., Galloway, R., & Gelli, A. (2016). *School feeding programs: Measuring impact and prioritizing mechanisms for sustainable development*. Public Health Nutrition, 19(5), 957–962.